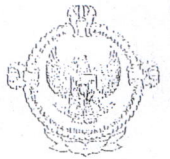




Bali Post



# Rancu, Data Kemiskinan di Badung

Mangupura (Bali Post) -

Data angka kemiskinan di Kabupaten Badung rancu. Sejumlah instansi yang menjadi rujukan, selama ini mengantongi angka yang berbeda-beda. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) Badung, misalnya, menunjukkan angka kemiskinan 12 ribu jiwa. Sementara data Kementerian Sosial, angka kemiskinan di Badung mencapai 21 ribu jiwa. Namun, Pemkab Badung mencatat data hanya 6 ribu jiwa.

Perbedaan tersebut diakui Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/2) kemarin, Wabup Suiasa mengatakan perlu adanya koordinasi lebih lanjut antarinstansi guna menyikapi belum sinkronnya data kemiskinan di Badung. "Kami minta pihak BPS Badung melakukan koordinasi bareng agar tidak menjadi beban data kemiskinan,"

ungkapnya.

Menurut pejabat asal Desa Pecatu ini, BPS menggunakan pola ekonomi makro. Dalam hal ini penduduk miskin yang telah menetap selama enam bulan di Kabupaten Badung masuk hitungan. Kendati bukan warga Badung atau ber-KTP Badung, mereka masuk data BPS sebagai warga miskin, sehingga menemukan angka 12 ribu jiwa.

"Hal ini sangat berbeda dengan pola yang kami lakukan, yakni dengan pola *by name by address*. Pola ini adalah data riil yang kami dapat dari desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Badung," jelasnya.

Dengan pola tersebut, pihaknya menemukan angka kemiskinan di Badung hanya ada enam ribu jiwa atau satu persen dari jumlah penduduk

Badung yang mencapai 600 ribuan jiwa. "Nanti kita akan kombinasi data BPS dan data yang riil kami miliki, sehingga nantinya tidak lagi menjadi beban. Namun kami tetap *by name by address*," tegasnya.

Terkait langkah yang akan dilakukan guna menekan angka kemiskinan di Badung, Wabup Suiasa menyebutkan, pemerintah akan merancang pola pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Saat ini UEP di sejumlah desa sudah jalan dan diarahkan untuk warga miskin. Namun pendampingannya yang belum jelas.

"Kami sudah rancang un-

tuk pendampingan bantuan UEP ini agar tepat sasaran dan efektif mengurangi kemiskinan. Selama ini belum ada pendampingan untuk pengelolaan dana yang kami kururkan sebesar Rp 15 juta ini," jelasnya.

Dengan konsep pendampingan, terang mantan Wakil Ketua DPRD Badung itu, UEP akan benar-benar bermanfaat dan terarah. Karena itu, pihaknya akan menjajaki kerja sama dengan BPD Bali atau LPD di desa terkait untuk menyediakan tenaga pendamping UEP.

"Untuk penanganan kemiskinan skala besar di tingkat kabupaten, kami

akan melakukan kerja sama dengan desa. Sehingga selain APBD, APBDes juga ikut membantu *mem-back up* program pengentasan kemiskinan," tegasnya. (kmb27)

Edisi : 27, Feb, 2019

Hal : 3





## Alokasi Anggarannya Gunakan Skema Tahun Jamak

**REVITALISASI** Pasar Banyuasri disepakati dikerjakan selama dua tahun anggaran (2019 dan 2020). Untuk mencapai target itu pemerintah daerah bersama DPRD Buleleng, sepakat pelaksanaan revitalisasi proyek itu selama dua tahun menggunakan skema anggaran tahun jamak. Artinya, seluruh biaya revitalisasi Rp 188 miliar lebih itu dialokasikan dalam dua tahun anggaran. Dengan skema seperti itu nantinya pelaksanaan proyek itu dilakukan satu kali tender. Pengerjaannya tahun 2020 tetap dilakukan oleh rekanan pemenang tender di awal. Apakah yang menjadi pertimbangan pemkab dan dewan, sehingga pengerjaan proyek itu perlu skema anggaran tahun jamak?

**KESEPAKATAN** memaknai skema tahun jamak sudah dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan Senin (25/2) lalu. Penandatanganan itu dilakukan setelah sidang paripurna pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) di Gedung DPRD Buleleng. Penandatanganan ini dihadiri Bupati Putu Agus Suradnyana.

Sebelum penandatanganan, anggota dewan diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya. Pada intinya, skema pelaksanaan revitalisasi tahun jamak itu disetujui untuk dilaksanakan. Keputusan menuntaskan revitalisasi Pasar Banyuasri dalam dua tahun ke depan. Proyek itu saat disosialisasikan melibatkan lebih dari 500 pedagang pasar. Lalu, muncul desakan pedagang agar pemerintah memberikan jaminan terkait kepastian waktu pelaksanaan proyek itu. Pedagang tidak ingin revitalisasi pasar itu mandek di tengah jalan, karena alasan anggaran yang tersedia justru tidak cukup.

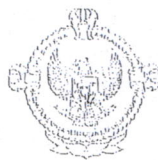
Bupati Putu Agus Surad-

nyana mengatakan, pertimbangan memakai skema tahun jamak ini karena pemerintah daerah tidak ingin revitalisasi Pasar Banyuasri itu berjalan lambat. Hal seperti itu justru dapat menimbulkan dampak tidak baik bagi pedagang itu sendiri. Apalagi, pengalaman pelak-

sanaan proyek bertahap, ketika pemerintah melanjutkan pengerjaan ke tahap berikutnya, harus dilakukan pada masa pemeliharaan pekerjaan yang telah dikerjakan. Bahkan, masa pemeliharaan ini berlangsung enam bulan, sehingga kalau skema lama itu digunakan,

Bupati khawatir revitalisasi Pasar Banyuasri tidak bisa dikerjakan tuntas seratus persen. "Pelaksanaan teknis di lapangan agar dipermudah. Kita tidak ingin diprotes pedagang. Akibat terlalu lama proyeknya tidak tuntas, sehingga kita sepakati bersama dewan memakai skema





Sambungan Hal 8...



Bali Post/mud

**NOTA KESEPAKATAN** - Bupati Putu Agus Suradnyana (tengah) menunjukkan nota kesepakatan pelaksanaan revitalisasi Pasar Banyuasri dengan skema anggaran tahun jamak di Gedung DPRD Buleleng, Senin (25/2) lalu.

tahun jamak dan tahun 2020 anggarannya sudah dipasang dan pelaksanaan berlanjut," katanya.

Terkait teknis pelaksanaan revitalisasi, pemerintah tidak ingin kualitas pengerjaan proyek itu berubah-ubah dari dokumen perencanaan yang sudah disusun. Ini penting karena kalau pelaksanaan bertahap dilakukan dengan dua kali tender. Maka pemenang tender tahap kedua nanti bisa saja tidak sama kualitas pekerjaannya dengan yang dilakukan pada tahap awal. "Kalau dikerjakan saat tahun jamak, nanti masa pemeliharaan dilakukan setelah proyek tuntas seratus persen, sehingga akan menghindari pelaksanaan proyek molor dari target yang sudah ditentukan," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, revitalisasi Pasar Banyuasri mulai digarap tahun 2019 ini, berlanjut 2020 mendatang. Untuk membangun pasar semimodern pertama di Bali Utara, Pemkab memerlukan total anggaran Rp 188 miliar.

Tahun ini akan diker-

jakan konstruksi awal dengan menelan anggaran Rp 94,289 miliar lebih. Paket pekerjaan ini sudah masuk tahap persiapan pengumuman pekerjaan dan tender di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Sekkab Buleleng. Selain itu, pemerintah juga sedang membangun pasar darurat untuk menampung lebih dari 500 pedagang yang mulai direlokasi April 2019 mendatang. Untuk tahap dua pada tahun 2020, pemerintah melanjutkan pengerjaannya hingga tuntas seratus persen dengan alokasi anggaran Rp 85,710 miliar lebih.

Acara itu juga dihadiri Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P., Asisten Perekonomian Ni Made Rousmini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Penelitian (Bappeda Litbang) Nyoman Genep, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin) Ketut Suparto, dan utusan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan, DPRD dipimpin Ketuanya Gede Supriatna bersama anggotanya. (mud)

Edisi : Rabu, 22 Feb 2019

Hal : 8





## Tim BPK Audit Satuan Kodam IX/Udayana

**Denpasar (Bali Post) -**

Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPK RI merampungkan tugasnya terhadap laporan Satuan Jajaran Kodam IX/Udayana. Laporan hasil audit tersebut diserahkan kepada Pangdam Mayjen TNI Benny Susianto, Senin (25/2) lalu di Makodam, Denpasar. Dalam sambutannya, Pangdam Benny Susianto mengatakan sekitar delapan hari melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan di wilayah Kodam IX/Udayana, Tim Wasrik BPK mendapatkan temuan-temuan penting.

Mencermati hasil temuan tersebut, Benny Susianto menyampaikan terima kasih dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. "Kepada para Dansat dan Kabalak jajaran Kodam IX/Udayana yang menjadi objek pemeriksaan agar segera mempelajari serta melakukan perbaikan serta penyempurnaan sesuai petunjuk, arahan dan rekomendasi dari Tim Wasrik BPK RI," ujarnya.

Dengan demikian pelaksanaan program kerja dan anggaran berjalan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika para Dansat/Kabalak masih mengalami kendala agar dikordinasikan dengan Tim Wasrik BPK RI.

Ia berharap Tim Wasrik BPK dapat mewadahi dan memberikan arahan serta masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program kerja dan anggaran ke depan. Sehingga Kodam IX/Udayana sebagai salah satu Kotama TNI Angkatan Darat dapat berkontribusi positif dalam upaya mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada waktu bersamaan, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri mewakili Pangdam menerima laporan hasil wasrik Tim Post Audit Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjenad). Tim Wasrik Itjenad melaksanakan tugasnya sekitar 15 hari di satuan jajaran Kodam IX/Udayana. Brigjen Kasuri mengatakan, hasil temuan Wasrik tersebut

akan ditindaklanjuti dengan cara melakukan perbaikan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Temuan dan koreksi maupun atensi hasil pemeriksaan yang diberikan serta penjelasan tentang berbagai perubahan diperlukan agar segera ditindaklanjuti para kepala dan komandan di masing-masing satuan.

Dengan demikian tidak terulang lagi adanya kesalahan yang sama, sehingga pelaksanaan

program kerja yang akan datang dapat berjalan lebih efisien, efektif dan akuntabel. "Kepada Tim Wasrik Post Audit Itjenad, apabila masih terdapat hal-hal yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan objek pemeriksaan, kami siap membantu dan memfasilitasi secara optimal untuk memperlancar penyelesaian dan perbaikan program yang masih memerlukan perbaikan," ujar Kasdam. (kmb36)



**HASIL AUDIT - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto menerima hasil audit dari Tim Wasrik BPK RI.**

Bali Post/ist





## Revitalisasi Pasar Sasar Dua Pasar Desa

### ★ Usulan Pasar Julah Terlambat

SINGARAJA, NusaBali

Revitalisasi pasar desa kembali mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat di tahun 2019. Kali ini ada dua pasar desa yang akan diperbaiki, yakni Pasar Desa Sawan, Kecamatan Sawan dan Pasar Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt. Sedangkan keinginan warga Desa Julah, Kecamatan Tejakula agar mendapat dana revitalisasi pasar belum bisa dikabulkan.

Informasi dihimpun, sejatinya Pemkab Buleleng mengajukan usulan revitalisasi pasar ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk 5 desa. Namun, usulan tersebut hanya disetujui untuk 2 desa dengan total dana sebesar Rp 3,7 miliar. Sumber pembiayaan berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagprin),

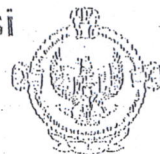
Ketut Suparto yang dikonfirmasi, Rabu (27/2) mengatakan, dalam pembangunan pasar desa tersebut, pihaknya sudah menyusun detail engineering design (DED). Rinciannya, untuk Pasar Desa Sawan dialokasikan dana sebesar Rp 1,7 miliar, sedangkan di Pasar Desa Pangkungparuk Rp 2 miliar. "Usulannya memang 5, tetapi karena ada persyaratan dan pertimbangan lain di pusat, usulan kita hanya disetujui 2 pasar saja," kata Suparto.

Disinggung keinginan warga Desa Julah agar mendapat dana revitalisasi pasar desa, Kadis Dagprin Suparto mengakui ada aspirasi dari warga Julah terkait keinginan agar pasar desa direvitalisasi. Namun, Suparjo mengungkapkan, aspirasi itu baru sebatas informasi yang dia terima. Karena itu, Suparjo mengaku

sudah meminta pihak Desa Julah agar menyampaikan usulan secara resmi kepada Pemkab Buleleng. Sehingga usulan itu bisa ditindaklanjuti dengan mengajukan usulan ke pemerintah pusat. "Ini baru sebatas informasi, belum ada usulan masuk. Makanya saya sarankan diusulkan dulu. Kalau sekarang memang belum bisa diperbaiki, karena memang belum ada usulan yang masuk," terangnya.

Sebelumnya, Pemkab Buleleng telah merevitalisasi 6 pasar di tahun 2018 dengan sumber pembiayaan dari DAK. Enam pasar yang direvitalisasi itu berada di Desa/Kecamatan Tejakula, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Desa Bungkul, Desa Giri Emas dan Desa Sudaji di Kecamatan Sawan, serta Pasar Desa/Kecamatan Busungbiu. **k19**





## DANA KELURAHAN

### Per Kelurahan Kebagian Rp 352 Juta

**SINGARAJA** - Kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng disebut akan mendapat cipratan dana dari pemerintah pusat. Masing-masing kelurahan, akan mendapatkan dana hingga Rp 352 juta. Dana itu meningkat dua kali lipat lebih, dari anggaran rutin yang berkisar pada angka Rp 150 juta per tahun.

Saat ini tercatat ada 19 kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 17 kelurahan ada di Kecamatan Buleleng, sementara dua kelurahan lainnya ada di Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Seririt. Kecamatan Buleleng yang notabene memiliki kelurahan paling banyak, mengaku sudah mendapat informasi bahwa akan ada tambahan anggaran kelurahan.

Camat Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara mengatakan, tambahan dana kelurahan itu akan digunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana kelurahan, serta program pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. "Sekarang masih menunggu perbup soal pengelolaan anggaran itu. Ini juga *kan* berkaitan dengan anggaran yang besar, jadi lurah harus siap dengan pengelolaan tersebut. Seperti penata usaha keuangan, bendahara pembantu, sampai pejabat pelaksana teknis kegiatan, itu harus disiapkan," katanya.

Sementara menanti aturan tersebut, pihak kecamatan pun akan melakukan bimbingan teknis untuk pengelolaan anggaran tersebut. Sehingga saat peraturan bupati telah disahkan, staf di kelurahan sudah siap dengan pengelolaan anggaran tersebut.

"SDM-nya kami siapkan dulu, supaya mereka siap mengelola anggaran," tukasnya. (eps/gup)

Edisi : Kamis, 28, Feb, 2019

Hal. : 10